

BUDAYA BARU BANGSA INDONESIA

Oleh Nurcholish Madjid

Kita mengetahui bahwa bahasa Indonesia diangkat dari bahasa Melayu, dengan standar Melayu Riau. Berkaitan dengan ini, sungguh menarik bahwa pada saat Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda 1928 para peserta tidak memilih, misalnya, bahasa Jawa sebagai bahasa nasional. Padahal sebagian besar yang datang ke kongres itu adalah pemuda-pemuda asal Jawa.

Pilihan kepada bahasa Melayu agaknya terjadi dengan tingkat spontanitas yang tinggi. Ini berarti ada kesadaran tertentu pada para peserta kongres: yaitu kesadaran yang mewujudkan nyata dalam pilihan mereka kepada bahasa Melayu sebagai bahasa nasional itu yang jika dikontraskan dengan kemungkinan kesadaran sebaliknya, maka kesadaran yang agaknya umum ada pada para peserta kongres itu ialah: kesadaran tentang nilai-nilai kemasyarakatan dan kenegaraan modern, dengan ciri-ciri utama paham persamaan manusia (egalitarianisme), kosmopolitisme, keterbukaan, dan demokrasi. Nilai-nilai yang sekarang sedang kita perjuangkan bersama sejalan dengan era reformasi.

Pada masa lalu, dalam budaya Nusantara, nilai-nilai itu semua secara potensial memang terkandung dalam watak dasar bahasa Melayu sebagai bahasa pola ekonomi perdagangan dan budaya pantai. Kemungkinan kesadaran kebalikannya ialah nilai-nilai kemasyarakatan yang tradisional dan feodal — yang mengenal hirarki sosial yang cukup ketat, disertai nativisme, atavisme,

ketertutupan dan paternalisme sebagaimana secara potensial terkandung dalam watak dasar bahasa Jawa sebagai bahasa pola ekonomi pertanian tanah-tanah subur dan budaya pedalaman.

Lcpas dari hasil Kongres Pemuda, dalam kenyataannya bentuk-bentuk ketegangan tertentu akibat tarik-menarik antara kedua pola budaya itu, budaya pantai vs budaya pedalaman, amat terasa dalam keseluruhan proses pertumbuhan budaya bangsa kita sampai saat-saat sekarang ini.

Orde Baru, misalnya, merupakan fenomena kemenangan budaya pedalaman atas budaya pantai atau pesisir. Dan masa reformasi ini, kalau kita berhasil mengisinya sesuai dengan cita-cita yang kita bayangkan bersama, merupakan kesempatan mewujudkan nilai-nilai budaya pantai atau pesisir itu, apalagi kecenderungan kemanusiaan universal (global) dewasa ini, melalui apa yang disebut budaya modern mengarah kepada nilai-nilai yang lebih egaliter, kosmopolit, terbuka dan demokratis. Artinya, nilai-nilai kebalikannya (feodalisme) tentu akan tersudut kepada posisi defensif, untuk akhirnya harus melakukan kompromi-kompromi yang mengarah kepada terwujudnya budaya pesisir yang sangat menekankan nilai-nilai kemanusiaan universal, dengan ciri-ciri utama paham persamaan manusia (egalitarianisme), kosmopolitanisme, keterbukaan, dan demokrasi.

Cukup jelas bagaimana hasil akhir tarik-menarik antara kedua pola itu, tapi mungkin ketegangan akan masih kita rasakan dalam jangka waktu cukup lama mendatang. Tetapi karena sifatnya yang lebih terbuka dan universalistik dari pola budaya yang tercermin dalam bahasa Indonesia tadi, maka sebuah antisipasi memperkirakan bahwa kedudukan dan nilai yang terkandung dalam watak dasar bahasa itu akan semakin kukuh, akibat interaksinya dengan pola-pola budaya internasional dalam suasana hidup global umat manusia. Gejala ini sebagian terbukti dengan semakin sulitnya menghidupkan kembali secara penuh bahasa Jawa dan betapa bahasa ini sedang berubah fungsi menjadi hanya sebuah bahasa santai (*casual*) orang Jawa (sebab jika pembicaraan menjadi serius

pasti akan menggunakan bahasa Indonesia, biar pun di pusat-pusat budaya Jawa sendiri seperti Solo dan Yogya).

Dari sudut Keindonesiaan semata, gejala-gejala tersebut di atas jelas positif sekalipun tentu akan lebih baik jika suatu pola budaya lokal tidak total mati, karena potensinya untuk memperkaya budaya nasional. Karena itu, dalam rangka memperkuat wujud organik budaya bangsa, perhatian yang lebih besar dan lebih sungguh-sungguh harus diberikan kepada bahasa Indonesia, baik sebagai kelengkapan linguistik kebangsaan kita maupun sebagai modal dan kekayaan potensial pola budaya yang bermasa depan.

Berkenaan dengan itu, kita harus menyatakan dengan cukup sedih bahwa sistem pendidikan kita belum cukup memberi tempat kepada bahasa nasional, baik kurikuler maupun psikologis sebagai unsur kebanggaan kaum terpelajar Indonesia. Padahal dalam bahasa Indonesia inilah kita mempertaruhkan budaya baru. Sebagai misal dan perbandingan, negeri-negeri yang berbahasa Inggris, seperti Amerika Serikat, sedemikian tinggi menempatkan pelajaran bahasa Inggris dalam sistem pendidikan mereka, sehingga kualitas pribadi seorang yang terpelajar dengan sendirinya meliputi pula kemampuan berbahasa Inggris yang baik. (Sampai-sampai di Amerika ada perlombaan mengeja kata-kata Inggris dari tingkat sekolah sampai tingkat nasional!).

Kita dapat mencontoh negara-negara itu, dan kita tidak perlu merasa kurang dengan bahasa nasional kita. Dan serentak dengan kegiatan mengajarkan bahasa itu sebagai alat komunikasi, kita juga harus menanamkan dengan sadar kepada anak didik pola budaya yang tersimpan dalam semangat dan watak dasar bahasa Indonesia, yaitu paham persamaan manusia (egalitarianisme), kosmopolitisme, keterbukaan dan demokrasi, yang merupakan cita-cita politik kita dewasa ini.

Tampaknya inilah bagian amat penting dari usaha menyehatkan hakikat organik budaya nasional kita sehingga dalam kehidupan global ini, segala unsur dari luar dapat dicerna dengan baik dan “tubuh kultural” kita mampu menyerapnya sebagai bahan pertum-

buhan organiknya lebih lanjut. Serentak dengan itu, muatan bahasa nasional itu harus senantiasa diusahakan meningkat, antara lain dengan benar-benar menggalakkan setiap bentuk kegiatan penulisan kreatif dan penerjemahan dari bahasa-bahasa lain. Dengan begitu bahasa Indonesia akan tampil sebagai wahana produksi budaya yang tinggi, sehingga dari segi budaya itu, kita sebagai bangsa Indonesia tidak hanya berkedudukan sebagai konsumen belaka.

Maka karena itu kesimpulan kita: dukungan linguistik dan kultural kepada wawasan kenegaraan modern ada dalam jiwa dan watak dasar bahasa Melayu yang bisa juga kita tambahkan, khususnya setelah mengalami Islamisasi. Karena dukungan linguistik dan kultural itu kurang dalam bahasa-bahasa lain di Nusantara ini, maka perlulah bahasa Melayu — yang sekarang adalah bahasa Indonesia — diberi isi dan dikembangkan secara maksimal, sebab keputusan untuk memilih bahasa Melayu itu sebagai bahasa nasional tidak saja merupakan keputusan kebahasaan, tetapi juga keputusan kebudayaan dan wawasan sosial politik. Hasilnya ialah wawasan modern kebangsaan dan kenegaraan Indonesia sebagaimana secara resmi termuat dalam UUD 45, terutama Mukadimahnya, juga batang-tubuhnya.

Sesungguhnya konsep kenegaraan Indonesia dan budaya Keindonesiaan itu sendiri dibuat berdasarkan semangat budaya pola pesisir yang lebih demokratis, bukan budaya pedalaman yang feodal. Perkembangan inilah yang saat-saat ini sedang kita saksikan ekspresi keluarnya dalam bentuk gejala-gejala sosial-politik seperti tuntutan orang banyak untuk dapat berpartisipasi secara lebih luas dalam proses-proses pengambilan keputusan; dambaan pada tertib hukum yang lebih dapat dihandalkan, dan *predictable*; pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme; penegakan hak asasi manusia; pemberdayaan rakyat dan wakil-wakil mereka; pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi (kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat); percepatan laju demokratisasi, dan pelaksanaan nilai-nilai demokratis; dan seterusnya. [❖]